



The Governance Programme



THE AGA KHAN UNIVERSITY
(International) in the United Kingdom
Institute for the Study of Muslim Civilisations

*Keterangan disiapkan untuk acara yang berjudul
"Sharia di Europe? — Dalam Mengantisipasi Keputusan ECtHR pada Kasus Molla Sali vs Yunani" Aga Khan
Centre, London, 8 Oktober 2018, 12.30-14.30
Harap jangan mengutip atau mengedarkan tulisan ini tanpa seizin penulis*

SISTEM MUFTI YUNANI DALAM PERSPEKTIF GLOBAL: REFORMASI DI SEGITIGA TRAKIA, ATHENA, DAN STRASBOURG

Yüksel Sezgin
Syracuse University
ysezgin@maxwell.syr.edu

Penegakan hukum negara terhadap undang-undang agama keluarga, terutama ketika individu tidak mematuhi penerapannya dan melanggar sejumlah hak asasi manusia yang mendasar (misalnya kebebasan beragama, persamaan hak di hadapan hukum, hak perkawinan dan keluarga, dan hak prosedural termasuk proses hukum dan persidangan yang adil). Dalam kasus *Molla Sali vs Yunani* yang masih tertunda (no. 20452/14), ECtHR kemungkinan besar akan menyetujui pemohon dan menemukan bahwa pemerintah Yunani telah melakukan diskriminasi kepada pemohon atas dasar agama dan jenis kelamin, serta telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan properti, seperti yang dinyatakan oleh pemohon.

Jika ECtHR tidak menemukan pelanggaran, tanggapan pemerintah Yunani terhadap penghakiman ini dapat berupa salah satu dari lima bentuk kemungkinan berikut:

- 1) **Bisnis seperti biasa:** Pemerintah dapat mengabaikan keputusan tersebut dan memilih untuk tidak membawa perubahan apa pun ke "syariah" atau "sistem mufti" di Trakia Barat.
- 2) **Penghapusan sistem syariah dan mufti:** Hal ini dapat memilih penghapusan lengkap dari sistem mufti, dengan demikian membawa masalah status pribadi dari populasi Muslim di wilayah tersebut ke dalam lingkup Undang-Undang Perdata Yunani (seperti yang dilakukan setelah penghapusan hukum dan pengadilan kerabian (Yahudi) oleh pemerintah Yunani pada tahun 1946, atau penghapusan hukum dan pengadilan Kristen—bersama dengan syariah—oleh pemerintah Turki pada tahun 1926).
- 3) **Pengadilan Mufti Spiritual dan Kadi Terpisah:** Pemerintah juga bisa memisahkan fungsi spiritual dan yudisial dari kantor mufti. Meskipun memungkinkan para mufti untuk dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin

agama tanpa jabatan atau kantor resmi, mufti dapat mendirikan jaringan hirarkis pengadilan Islam (syariah) di Trakia Barat yang dikelola oleh para *kadi* yang ditunjuk pemerintah (seperti dalam model pengadilan syariah Israel).

4) **Syariah di Pengadilan Sipil** Hal ini bisa menghapuskan kantor mufti dan membawa penerapan hukum keluarga Muslim di bawah yurisdiksi pengadilan sipil di wilayah tersebut (seperti dalam model negara India).

5) **Perbaiki Sebagian Sistem Saat Ini** Terakhir, pemerintah dapat memilih untuk mereformasi parsial sistem saat ini demi menghindari rasa malu lebih lanjut di hadapan para mitra Eropa-nya, dengan mengatasi kekhawatiran yang menyebabkan kasus saat ini di hadapan ECtHR pertama kali.

Mengingat perkembangan legislatif baru-baru ini seperti UU 4511/2018 (Januari 2018) dan rancangan keputusan presiden mengenai aturan prosedural di pengadilan mufti (September 2018), sepertinya pemerintah Yunani telah memilih Opsi # 5: perbaikan parsial. Selain itu, pemerintah Yunani juga baru-baru ini menunjuk tiga wakil mufti di Komotini, Xanthi, dan Didymoteicho. Namun apakah yang dimaksud dengan penunjukan dan perkembangan legislatif ini? Bagaimanakah hal-hal itu akan mempengaruhi sistem syariah atau mufti saat ini di Trakia Barat? Akankah "reformasi" yang diusulkan cukup untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan kepastian hukum yang telah mengakibatkan kasus yang sedang tertunda di depan Pengadilan Strasbourg? Seberapa unikkah sistem mufti Trakia dibandingkan dengan sistem hukum keluarga Muslim yang serupa di tempat lain? Bagaimana perubahan legislatif dan administratif yang baru mempengaruhi posisi sistem mufti Yunani di hadapan negara-negara lain yang menerapkan hukum keluarga Muslim (terutama negara-negara mayoritas non-Muslim)? Presentasi ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini secara singkat.

Perubahan Legislatif Terkini:

Pada bulan Desember 2017, hanya beberapa hari sebelum sidang pemeriksaan Grand Chamber Molla Sali vs Yunani, Pemerintah Yunani memperkenalkan RUU baru yang disahkan oleh parlemen sebagai UU No: 4511/2018 pada tanggal 15 Januari 2018. Undang-undang tersebut hanya menambahkan paragraf baru (4) ke Pasal. 5 UU 1920/1991, yang mengatur yurisdiksi mufti. Kini, pasal 5 (4) yang diamandemen itu menyatakan yurisdiksi mufti sebagai pengecualian. Untuk meminta yurisdiksi mufti atas masalah status pribadi, kedua belah pihak harus menyetujuinya secara tertulis; jika tidak, yurisdiksi menjadi milik pengadilan sipil. Perkara warisan secara otomatis tunduk pada Undang-Undang Perdata Yunani, kecuali sang pemberi warisan meninggalkan surat wasiat sipil yang di sahkan notaris yang secara spesifik akan memerintahkan pembagian hartanya sesuai dengan hukum Islam. UU 4511/2018 menyatakan bahwa amandemen pasal 5 (4) akan mulai berlaku setelah diterbitkannya keputusan presiden yang mengatur aturan prosedural untuk "pengadilan" mufti.

Pada tanggal 1 September 2018, sebuah rancangan keputusan presiden dikeluarkan. Keppres tersebut terdiri dari 28 pasal, berkenaan tentang masalah subjek yurisdiksi wilayah dan pribadi mufti di Pasal 2 dan 3 (di masa lalu pengadilan Yunani telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan mengenai yurisdiksi mufti. Keppres tersebut bertujuan untuk memperjelas masalah tersebut dalam dua pasal ini).

Pasal 4 menetapkan bahwa usia minimum pernikahan adalah 18 tahun, tetapi memungkinkan mufti untuk mengesahkan pernikahan di bawah umur, dengan seizin wali sah dari anak di bawah umur tersebut.

Pasal 5 mengharuskan agar setiap pihak yang muncul di hadapan mufti diwakili oleh seorang pengacara. Pasal ini menyatakan bahwa mereka yang tidak mampu membayar pengacara dapat meminta bantuan hukum gratis sesuai dengan UU 3226/2004.

Pasal 6 menyatakan bahwa tuntutan di hadapan mufti harus dibuat dalam format tertulis, dan bahwa keputusan mufti harus dipublikasikan.

Pasal 10 menetapkan bahwa tuntutan di hadapan mufti harus dilaksanakan dalam bahasa Yunani. Jika para pihak tidak dapat berbahasa Yunani, seorang penerjemah direkrut.

Pasal 11 mensyaratkan untuk keputusan Mufti dikeluarkan dalam bahasa Yunani dan Turki Utsmaniyah.

Pasal 13 menyatakan bahwa keputusan mufti tidak dapat ditegakkan tanpa keputusan dikeluarkan oleh satu anggota lokal pengadilan tingkat pertama. Pengadilan sipil tersebut harus memeriksa jika penghakiman mufti tersebut telah dikeluarkan di dalam yurisdiksinya, dan jika hal itu bertentangan dengan Konstitusi Yunani atau Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Sebuah banding terhadap keputusan satu anggota dapat diajukan ke multi-anggota pengadilan tingkat pertama.

Pasal 14-22 berurusan dengan struktur administrasi dan kepegawaian pengadilan mufti. Perkembangan yang terpenting di sini adalah bahwa setiap majelis mufti akan ditunjuk sebagai penasihat hukum yang dilatih dalam hukum sekuler untuk membantu sang mufti.

Sistem Mufti dalam Perspektif Perbandingan

Ada 53 negara di dunia yang secara resmi mengintegrasikan Hukum Keluarga Muslim (MFL) ke dalam sistem hukum mereka. Dari 53 negara ini, 181-nya adalah negara dengan mayoritas non-Muslim. Dari 18 ini, 5 negara menerapkan MFL dalam pengadilan sipil (Tanzania, Myanmar, India, Ghana, dan Uganda). Yang 12 lainnya memiliki pengadilan khusus agama (syariat) yang dikelola oleh kadi Muslim dan memiliki mekanisme banding khusus. Di hampir semua negara dengan pengadilan syariah, terdapat undang-undang hukum yang menentukan sumber hukum materi dan prosedur yang berlaku. Hanya Yunani yang memiliki mufti yang mengadili perselisihan; di negara-negara lain yang menerapkan MFL dalam pengadilan syariah, kadi-lah yang mengadili.

Dalam hal ini, sistem mufti Yunani adalah suatu pengecualian. Hukum keluarga Muslim yang Mufti sepertinya terapkan tidak dikodifikasikan. Tidak ada aturan prosedur atau bukti yang diterapkan secara seragam di pengadilan mufti. Juga tidak ada banding langsung untuk keputusan mufti, yang tidak dipublikasikan. Bahasa (Turki Utsmaniyah) yang mereka gunakan dalam keputusan mereka tidak dapat dibaca atau dipahami oleh sebagian besar klien mereka. Keputusan Mufti hanya diterjemahkan secara singkat ke dalam bahasa Yunani tanpa banyak detail tentang kasus, bukti, atau aturan yang diterapkan. Pengadilan sipil, yang secara eksklusif memiliki staf hakim non-Muslim yang umumnya tidak memiliki pengetahuan hukum Islam atau bahasa dan budaya masyarakat yang bersangkutan bergantung pada terjemahan ringkasan ini untuk meninjau keputusan mufti dan menyatakan bahwa itu dapat diberlakukan (dalam prosesnya, mereka juga seharusnya "meninjau" jika keputusan mufti sesuai dengan konstitusi atau ECHR-seperti yang diharapkan, dalam keadaan seperti ini, mereka hanya menyetujui aturan mufti tanpa tinjauan efektif."

Singkatnya, sistem mufti telah lama membutuhkan perbaikan secara menyeluruh. Kasus yang tertunda di depan Pengadilan Strasbourg telah memberi pemerintah kesempatan untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem, tetapi sejauh ini pemerintah telah gagal memanfaatkannya. UU 4511/2018 dan rancangan keputusan presiden pada bulan September 2018 tidak cukup untuk memperbaiki masalah (meskipun keduanya memiliki beberapa ketentuan positif), karena dengan kesalahan besar mendiagnosis masalah yang dihadapi.

¹ Kamerun, Eritrea, Etiopia, Ghana, Yunani, India, Israel, Kenya, Mauritius, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda.

Di bawah pemerintahan yang sekuler dan demokratis, tidak seorang pun harus tunduk pada hukum-hukum berbasis agama tanpa persetujuan jelasnya terhadap penerapan undang-undang ini. Individu harus diberikan mekanisme jalan keluar alternatif. Dalam hal ini, baik UU 4511/2018 dan rancangan keputusan presiden pada bulan September 2018, terlepas dari kekurangan utama keduanya, dapat dianggap sebagai perkembangan positif, karena memberikan opsi jalan keluar yang jelas kepada Muslim Trakia.

Rancangan keputusan presiden pada bulan September 2018 berisi beberapa ketentuan penting lainnya. Rancangan ini menghilangkan ambiguitas sebelumnya mengenai yurisdiksi wilayah dan subjek dari mufti. Yaitu mensyaratkan bahwa proses mufti ditulis dan keputusannya dipublikasikan. Ini merupakan langkah-langkah aturan-hukum penting yang akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas pengadilan mufti. Partai-partai yang muncul di hadapan pengadilan mufti diharuskan memiliki perwakilan hukum — langkah penting lainnya menuju peningkatan akuntabilitas. Selain itu, setiap pengadilan mufti akan diberikan penasihat hukum yang memiliki pelatihan hukum sekuler dari universitas nasional dan pengalaman hukum untuk membantu di pengadilan.

Meskipun memiliki langkah-langkah positif ini, rancangan keputusan juga mencakup beberapa langkah yang salah. Misalnya, rancangan ini mengharuskan tuntutan untuk dilakukan hanya dalam bahasa Yunani. Baik mufti maupun anggota minoritas Muslim terutama berbicara dalam bahasa Turki sebagai bahasa ibu mereka, dan banyak individu di komunitas itu tidak

mengerti bahasa Yunani. Rancangan keputusan juga mengharuskan keputusan mufti untuk ditulis dalam bahasa Yunani dan Turki Utsmaniyah. Kebutuhan akan keputusan untuk ditulis dalam bahasa Yunani dapat dibenarkan secara sempurna, karena pengadilan sipil perlu meninjaunya dan mengeluarkan keputusan yang dapat ditegakkan. Namun kebutuhan untuk memiliki putusan pengadilan yang ditulis di dalam bahasa Turki Utsmaniyah tidaklah mudah dipahami, selain dari kebutuhan untuk mempertahankan ritual kuno dari pengadilan mufti. Malahan, keputusan seharusnya ditulis dalam bahasa Turki modern selain dalam bahasa Yunani, tanpa penggugat perlu mengeluarkan biaya terjemahan tambahan. Bahasa Turki adalah bahasa asli mayoritas masyarakat di Trakia Barat, sementara bahasa Turki Utsmaniyah hanya dapat dibaca oleh sejumlah kecil orang yang pernah bersekolah di madrasah di wilayah tersebut. Bahkan, dalam banyak kesempatan saya melihat orang-orang yang tidak dapat membaca atau memahami keputusan mufti. Ini adalah masalah utama peraturan-hukum.

Terlepas dari masalah prosedural ini, rancangan keputusan juga mencoba untuk mengatur usia pernikahan bagi pasangan Muslim. Hukum acara bukanlah tempat yang tepat untuk mengatasi masalah usia minimum pernikahan. Sebaliknya, itu harus diatur, bersama dengan poligini, dan <g id="2">talak</g> (perceraian laki-laki yang di luar hukum dan unilateral), dalam sebuah kode komprehensif yang berhubungan dengan hukum keluarga Muslim yang substantif. Komisi yang terdiri dari anggota parlemen Muslim serta ulama Islam dan pemangku kepentingan lainnya (aktivis hak perempuan, dll.) harus menyiapkan RUU keluarga Muslim dan menyerahkannya ke parlemen untuk disetujui. Bukti menunjukkan bahwa aturan prosedural dan hukum pidana yang hanya mengkriminalisasi praktik yang "tidak diinginkan" seperti pernikahan di bawah umur, poligini, dan "talak" biasanya tidak cukup untuk membawa perubahan sosial atau hukum yang positif di masyarakat.

Meskipun menunjuk para penasihat hukum yang terlatih dalam hukum sekuler untuk pengadilan mufti akan menjadi langkah ke arah yang benar, pihak berwenang harus memastikan bahwa beberapa dari mereka yang ditunjuk adalah perempuan. Meningkatkan representasi perempuan dalam sistem mufti itu penting. Tidak ada hukum Islam yang melarang perempuan untuk mengeluarkan fatwa atau menjadi mufti. Apalagi, dalam beberapa dekade terakhir, umat Muslim

perempuan telah ditunjuk sebagai hakim Islam untuk pengadilan syariah di beberapa yurisdiksi (yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Israel, Otoritas Palestina di Tepi Barat). Oleh karena itu, pemerintah Yunani dapat mempertimbangkan untuk mengubah undang-undang untuk membuka pintu bagi penunjukan mufti perempuan. Demikian juga, sebagai kriteria untuk penunjukan mufti (masalah penunjukan mufti itu sendiri adalah masalah besar, lihat keputusan ECtHR dalam *Serif vs Yunani*, dan *Agga vs Yunani*) direvisi, pemerintah juga harus mewajibkan mufti, yang bertindak sebagai hakim agama, memiliki pelatihan dalam hukum perdata dan konstitusional serta akrab dengan konvensi Eropa dan internasional tentang hak asasi manusia dan perempuan. Kriteria pemilihan dan pengangkatan mufti harus setara dengan kriteria untuk anggota pengadilan sipil.

Selain itu, mekanisme untuk mengajukan banding secara langsung terhadap keputusan mufti harus ditetapkan. Otoritas banding (pengadilan) harus mencakup ahli hukum Islam dan

hukum konstitusional yang dipilih dari kalangan komunitas Muslim di Trakia.

Sistem peninjauan konstitusional saat ini sangat tidak efektif. Para hakim pengadilan sipil yang bertugas di sirkuit anggota tunggal di wilayah tersebut harus dilatih dalam hukum dan budaya Islam masyarakat setempat, atau dibantu oleh para ahli dari komunitas yang memiliki kompetensi hukum, budaya, dan bahasa untuk melakukan tinjauan yang efektif. Saat ini tidak ada hakim Muslim tunggal dalam sistem pengadilan Yunani. Pemerintah harus melakukan upaya tulus untuk merekrut hakim sipil dari antara anggota komunitas Muslim yang memenuhi syarat dan menunjuk beberapa dari antara mereka ke pengadilan negara di wilayah tersebut.

Sistem mufti Yunani menempati peringkat rendah bila dibandingkan dengan sistem MFL lain di dunia (di negara-negara mayoritas Muslim dan non-Muslim) dalam hal jaminan hukum dan pemeriksaan (prosedural dan substantif) yang ditempatkan pada hukum dan pengadilan agama untuk memastikan kepatuhan terhadap supremasi hukum dan standar hak asasi manusia/wanita. Misalnya, pada IRAMFAL (Indeks Akomodasi Berbasis Hak Hukum Keluarga Muslim), indikator gabungan dari aturan hukum dan keramahan hak asasi manusia sistem MFL, Yunani mendapat skor 36%. Hanya untuk memberi Anda ide, negara dengan skor terendah -- Arab Saudi-- mendapat 6%, sedangkan negara dengan skor tertinggi — Mali -- mendapat 78% pada indeks. Semakin tinggi skor, semakin sesuai sistem MFL dengan aturan hukum dan standar hak asasi manusia/wanita. Di antara negara-negara penerap MFL yang adalah negara demokrasi (misalnya Indonesia, India, Ghana, dll.), Yunani memiliki skor IRAMFAL terendah.

Meskipun skornya sedikit, namun sistem mufti Yunani menikmati keuntungan yang cukup besar dibandingkan sistem MFL lainnya. Yunani adalah satu-satunya negara di dunia yang mensyaratkan tinjauan konstitusi *ex ante* (sebelum kejadian) terhadap putusan pengadilan agama. Di negara-negara lain yang memiliki tinjauan konstitusional, peninjauan dilakukan *ex post* (sesudah kejadian), yang menempatkan beban pelaporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum pada para pihak. Secara teori, semua keputusan mufti di Yunani harus ditinjau oleh pengadilan sipil, yang dapat membatalkannya jika ditemukan bertentangan dengan konstitusi. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, sistem peninjauan konstitusional *ex ante* (sebelum diterapkan) tidak dilakukan, karena adanya kendala politik dan struktural.

Rancangan keputusan presiden juga memperkenalkan mekanisme pengawasan *ex ante* lainnya yang merupakan perwakilan hukum wajib bagi individu yang muncul di hadapan pengadilan mufti. Ketika

ketentuan ini sepenuhnya berlaku, Yunani akan menjadi negara pertama di dunia dengan perwakilan wajib di pengadilan syariah.

Selain dua fitur unik ini, berkat UU 4511/2018, kini sistem mufti Yunani juga menyediakan individu dengan opsi jalan keluar yang fleksibel. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sistem Yunani tampaknya menawarkan kebebasan yang lebih besar kepada warga Muslim untuk memilih antara sistem Islam dan sipil — setidaknya dalam teori (kita masih perlu melihat dalam praktiknya jika ada kondisi yang diperlukan bagi individu untuk memanfaatkan yurisdiksi konkuren secara efektif). Sebagai contoh, sistem Israel memungkinkan yurisdiksi konkuren hanya untuk hal-hal seperti pemeliharaan, hak asuh, warisan dll., tetapi tidak untuk

pernikahan atau perceraian. Sistem India memungkinkan umat Islam untuk menikah secara sipil di bawah Undang-Undang Perkawinan Khusus tahun 1954, tetapi mereka yang memilih pernikahan agama nantinya tidak dapat menggunakan hukum sipil untuk perceraian. Di sisi lain, undang-undang dan rancangan keputusan Yunani yang baru tampaknya memungkinkan orang untuk menggunakan pengadilan sipil, bahkan jika mereka menikah secara agama.

Prospek untuk Reformasi dalam Sistem Mufti

Singkatnya,

* Jika tinjauan konstitusional *ex ante* dapat dilakukan secara tepat dan efektif;

(agar ini terjadi, hal-hal berikut harus terjadi: Pengadilan Kasasi, *Areios Pagos*, harus mengubah sikap esensial dan diskriminatifnya terhadap Muslim Trakia dan sistem mufti; hakim dari minoritas harus diwakili dalam pengadilan sipil; hakim sipil di Trakia harus dilatih dalam hukum Islam; hukum Islam prosedural dan substantif harus dikodifikasikan (atau "dipastikan"); dan keputusan mufti harus sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, termasuk rincian kasus, bukti, aturan, dll. Atau, seperti disebutkan sebelumnya, pengadilan banding khusus dapat dibentuk untuk meninjau keputusan mufti, daripada meminta hakim dan pengadilan sipil untuk melakukan itu.)

* Jika Trakia Muslim dapat secara efektif menggunakan sistem yang seragam;

(agar hal ini terjadi, kondisi berikut harus dipenuhi: pemerintah harus merekrut hakim dari minoritas ke pengadilan sipil, bekerja dengan masyarakat sipil untuk mendirikan klinik bantuan hukum yang akan membantu perempuan dan kelompok-kelompok yang tidak terlayani lainnya mengajukan kasus di pengadilan sipil; meningkatkan kesadaran akan opsi sipil di antara komunitas di wilayah tersebut, dan menyediakan layanan terjemahan *pro bono*, dll.)

* Jika setiap individu yang hadir di hadapan mufti diwakili oleh seorang pengacara (dan mereka yang tidak mampu membayarnya menunjuk penasehat hukum "pro bono");

Maka kita dapat mengharapkan sistem mufti Yunani menjadi lebih sesuai dengan aturan hukum dan hak asasi manusia. Bahkan, kita dapat memproyeksikan bahwa dengan pelaksanaan undang-undang baru, meskipun kekurangan yang disebutkan sebelumnya, skor IRAMFAL sistem mufti Yunani akan meningkat dari 36% menjadi

69% Ini akan menjadi perbaikan besar, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk membuat sistem ini sepenuhnya sesuai dengan hak-hak manusia/perempuan dan memperluas jaminan prosedural dasar.

Sebagai kesimpulan, dengan hati-hati saya optimis tentang prospek reformasi dalam

sistem mufti Yunani. Pemerintah non-Muslim tidak dapat dengan mudah memperkenalkan perubahan langsung ke dalam hukum atau pengadilan syariah. Perubahan biasanya terjadi ketika hal itu dimulai dari dalam, terutama oleh pengadilan dan para kadi sendiri. Jika pengadilan Yunani (atau Pengadilan Strasbourg) dapat secara efektif menekan para mufti untuk mematuhi konstitusi dan ECHR dari atas (tekanan atas ke bawah), dan jika para penggugat Muslim dapat secara efektif menggunakan yurisdiksi konkuren, sehingga mengerahkan tekanan lateral pada mufti (tekanan horizontal), dan jika kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat melobi para mufti dan elit agama serta memobilisasi kelompok-kelompok lokal (tekanan dari bawah ke atas), akan ada cukup tekanan pada para mufti untuk melakukan reformasi-diri. Jika mereka ingin melindungi yurisdiksi mereka dan mempertahankan klien, para mufti harus menjadi ujung tombak proses pembaruan diri dan pembaruan; kalau tidak, mereka akan segera menjadi tidak relevan.

Sistem Perbandingan Aturan Hukum/Kepatuhan SDM MFL: Yunani vs lainnya

